

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 119), efektif didefinisikan sebagai usaha atau tindakan yang ada efeknya, yaitu akibat, pengaruh, serta dampaknya, serta dapat memberikan hasil dan berhasil guna.

Menurut Hasibuan (2002: 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien.

Menurut Andrian (2001:12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang ada. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki dengan mempertimbangkan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan.

Menurut Martiman (2001:12), efektivitas adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan yang memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada. Efektivitas menunjukkan hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan efektivitas dalam penelitian ini adalah suatu keadaan di mana aktivitas atau kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung (Istianto, 2009: 15). Hampir tidak berbeda dengan pendapat tersebut, Aksa (2005: 6), mengungkapkan bahwa pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Pelayanan publik menurut Widodo (2002: 269), adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Thoha (1991) dalam Utoyo dan Tresiana (2004: 11), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh

seseorang/sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

- a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
- b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
- c) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah suatu bentuk pemberian layanan oleh suatu instansi untuk memberikan kemudahan dan bantuan, dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Passolong (2007: 42-46), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Struktur adalah susunan berupa kerangka yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi

memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan (*Standard Operating Procedures*), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah disentralisasi atau didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

b. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden. Aparatur negara atau aparatur adalah pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bekerja dalam badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan (*ability*) sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan

hal yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Moenir A.S. (2001: 44), bahwa dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Kemampuan aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerja sama, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, kecepatan dalam melaksanakan tugas, tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik, tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan, tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugas.

c. Sistem Pelayanan

Definisi sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan. Sistem pelayanan merupakan suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh.

Menurut Pamudji (1998: 17), untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan

masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari rangkaian pelayann yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan palayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan sepeertinggi mahalnya biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem pelayanan yang berkualitas pelayanan publik harus memperhatikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat pelayanan; kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan dan perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

B. Program

1. Pengertian Program

Menurut Jogianto (2002: 12), yang dimaksud dengan program adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Sementara itu menurut Hasibuan (2001: 35), program adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata kait dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Program merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang berinteraksi suatu program pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan dengan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi.

Menurut Baridwan (2000: 3), program adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh (terintegrasi) untuk melaksanakan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program terdiri dari beberapa komponen atau subbagian yang saling berhubungan dan tersusun sedemikian rupa dan yang bersama-sama hendak mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program terdiri dari unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai saling bergantung karena mempunyai tujuan yang sama.

2. Karakteristik Program

Menurut Jogianto (2002: 14-16), beberapa karakteristik suatu program adalah sebagai berikut:

a) Komponen Program

Merupakan dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen program atau elemen–elemen program berupa suatu subbagian atau bagian dari program tersebut.

b) Batas Program

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu program dengan program yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas program ini memungkinkan suatu program dipandang sebagai satu kesatuan batas suatu program menunjukkan ruang lingkup dari program tersebut.

c) Lingkungan Luar Program (*environment*)

Merupakan segala sesuatu diluar batas program yang mempengaruhi operasi program. Lingkungan luar program dapat bersifat menguntungkan dan merugikan program tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari program dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari program.

d) Penghubung Program (*interface*)

Merupakan media penghubung antara satu subbagian dengan subbagian yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subbagian ke subbagian yang lainnya. Keluaran (*output*) dari satu subbagian akan menjadi masukan (*input*) untuk subbagian yang lainnya melalui penghubung.

e) Masukan Program (*output*)

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam program. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi masuk, agar program dapat beroperasi.

f) Keluaran Program (*out put*)

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk sub program yang lain atau kepada supra program.

g) Pengolah Program

Merupakan suatu program dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h) Sasaran Program

Suatu program pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objectives*). Kalau suatu program tidak mempunyai sasaran, maka operasi program tidak akan ada gunanya. Sasaran dari program sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan program dan keluaran yang akan dihasilkan program.

3. Klasifikasi Program

Menurut Jogianto (2001: 17-18), program diklasifikasikan menjadi:

a) Program Abstrak dan Program Fisik

Program abstrak adalah program yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Program fisik merupakan program yang ada secara fisik.

b) Program Alamiah dan Program Buatan Manusia

Program alamiah adalah program yang terjadi melalui program alam tidak dibuat manusia. Program buatan manusia merupakan program yang dirancang manusia

c) Program Tertentu dan Program tak tentu.

Program tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.

Program tak tentu adalah program yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

d) Program Tertutup dan Program Tak Tertutup

Program tertutup merupakan program yang berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka program yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

4. Program dalam Suatu Organisasi

Menurut Handoko (2006: 13), program dalam suatu organisasi adalah suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan. Program merupakan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Jika dicermati, maka definisi program tersebut mencakup dua hal sebagaimana dikemukakan dalam definisi sebelumnya, yaitu memuat program dan taktik.

Hamel dan Prahalad dalam Handoko (2006: 14) menyusun konsep program dengan perspektif “kompetensi inti” sebagai titik tekan yang penting, sehingga program merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, program hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari apa yang terjadi”. Arti program adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*) sedangkan rencana

merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*) yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

Menurut Tripomo dan Udan (2005: 21), program dalam organisasi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*), kebijakan dan tindakan atau program organisasi. Dari pendapat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa didalam program harus ada tujuan, kebijakan dan juga program. Tujuan menjadi penting karena merupakan visi dari sebuah organisasi tertentu untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai.

Menurut Giffin dalam Tisnawati (2005: 3) mendefenisikan program sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi mencapai tujuan merupakan cita-cita utama organisasi, untuk itu diperlukan sebuah rencana yang terarah dan terkoordinasi dengan baik agar visi organisasi dapat dicapai dengan sebuah atau beberapa perencanaan yang matang. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan program adalah pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi atau pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam melakukan kemajuan organisasi tersebut dengan program yang dilakukan.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranaka (1996: 12), pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *empowerment* dan *empower*. Sedangkan Kamus Webster dan Oxford

English Dictionary menyebutkan kata *empower* mengandung dua makna yaitu (1) *to give ability to or enable* yaitu: upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (2) *to give power or authority to* yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada orang lain

Prijono dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117-118), juga menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan sering kali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi individu. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Dengan demikian proses pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons dalam Suharto, 2005:58-59). Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Ife dalam Suharto (2005: 58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dubois dan Miley (1977) dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 119) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

- a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
- b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
- e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan

dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulan dan proses yang ada menjebak masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007: 120).

2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parson *et.al.* (1994) dalam Suharto (2005) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005), mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index*, antara lain:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis dan lain-lain.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah satu tahun terakhir ada orang yang melarang bekerja diluar rumah atau mempunyai anak dan lain-lain.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan
- g. Kebebasan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

D. Masyarakat Desa

1. Pengertian Masyarakat Desa

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 24), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat sebagai sistem dari kebiasaan atau tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia,

keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah

Pengertian di atas menekankan bahwa masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dan terikat oleh tujuan yang sama dalam melakukan interaksi.

Selanjutnya Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2002: 24), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pengertian di atas menekankan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dan mampu mengatur kehidupan mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut I. N. Beratha (1982: 17), secara umum desa dapat diartikan sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya, dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, maka pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Terdapat kesan kuat, pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.

Pengertian di atas menekankan bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman diluar kota sekaligus bukan kota; desa adalah suatu komunitas kesatuan yang homogen dan desa merupakan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berada di pedalaman (terbelakang). Dalam pengertian ini terkandung unsur

sosiologis, selain bias kota yang sangat kentara dan posisi marginal orang desa dalam wacana, merupakan konstruksi orang kota.

Selanjutnya menurut I. N. Beratha (1982: 19), secara etimologis pengertian masyarakat desa dapat disamakan dengan *rural community*, yaitu suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun fiktif bertempat di wilayah *rural* (desa) di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan perasaan bahwa hanya dengan hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi.

Pendapat lain dikemukakan Taliziduhu Ndraha (1991: 22), masyarakat desa (penduduk suatu desa) adalah setiap orang yang terdaftar sebagai suatu penduduk atau bertempat atau berkedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak soal di mana ia mencari nafkah. Masyarakat desa sinonim dengan *gemeinscaft* yaitu masyarakat paguyuban, persekutuan dan kerukunan, di mana hubungan antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, seduka-sesuka, disertai saling percaya mempercayai yang berakar pada kesatuan keturunan dan kesatuan keluarga, mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa yaitu sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga baik formal maupun non formal, dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka

memenuhi kebutuhannya, serta memiliki ciri-ciri atau karakteristik khusus dan khas yang membedakannya dengan masyarakat lain.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Desa

Masyarakat desa selalu memiliki karakteristik dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”.

Menurut I. N. Beratha (1982: 22-24), beberapa karakteristik masyarakat desa yang terkait dengan etika dan budaya adalah sebagai berikut:

a. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. Pada umumnya kesederhanaan ini terjadi karena secara ekonomi memang tidak mampu dan secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

b. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya dan seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing”

c. Menjunjung tinggi “*unggah-ungguh*”

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau “*unggah-ungguh*” apabila:

- 1) Bertemu dengan tetangga
- 2) Berhadapan dengan pejabat
- 3) Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan
- 4) Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi
- 5) Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya

d. *Guyub*, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati sanubari mereka.

e. Lugas

“Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena mereka tidak berniat untuk menyakiti orang lain.

f. Tertutup dalam hal keuangan

Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi orang tersebut belum begitu dikenalnya. Katakanlah, mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.

g. Perasaan “minder” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masyarakat desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak bicara.

h. Menghargai orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial.

i. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama ini mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program pembangunan di daerahnya. Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. Sebagai contoh, mahasiswa menjanjikan pertemuan di Balai Desa pukul 19.00. Dengan tepat waktu, mereka telah *standby* namun mahasiswa baru datang pukul 20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu.

j. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki di hampir seluruh Indonesia adalah gotong royong, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip mereka “lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara”.

k. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari warga.

l. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agama. Secara kolektif, mereka mengaktualisasi diri dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: Tahlilan, Rajaban dan Jum'at Kliwonan.

E. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan. Masing-masing member penekanan yang berbeda-beda, perbedaan timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi oleh perseorangan pejabat yang berwenang. Istilah “kebijakan” sering dipertukarkan dengan: tujuan, program, keputusan, undnag-undang, ketentuan-ketentuan, dan rancangan-rancangan besar.

Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2008: 16)

Menurut Thomas Dye (Winarno, 2008: 17), menjelaskan bahwa kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan menurut David Easton (Nugroho, 2008: 54) mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). Kemudian menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Islamy, 2003:18) mengartikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Islamy, 2003:19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-

tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), Kebijakan Publik dalam arti positif setidaknya-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Istilah kebijakan sering dipertukarkan penggunaannya dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan/tindakan yang memiliki tujuan dan maksud, serta akibat yang dilakukan oleh seorang, sekelompok orang atau pemerintah dalam mengatasi suatu persoalan atau masalah dalam sebuah lingkungan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Kebijakan

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan menurut (Winarno, 2008: 17-19)

a. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak demikian semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai *tujuan yang baik*. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*)

b. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan, kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai.

c. Tuntutan (*demand*)

Sudah diketahui partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan tersebut

d. Dampak atau *outcomes*

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

e. Sarana atau alat kebijakan (*policy instruments*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri

3. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut (Winarno,2008:32-34):

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*). Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulka pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

4. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Winarno, 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*Outcome*) atau dampak

(*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tiga tipe ini antara lain:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

F. Program Mulang Tiyuh

Program Mulang Tiyuh adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pembangunan sektor pertanian dan membantu para petani untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada tersebut adalah dengan melaksanakan Program Mulang Tiyuh (Pulang Kampung Membangun Desa). Program Mulang Tiyuh (pulang kampung) merupakan salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, yang pada intinya mengajak kepada para tokoh dan masyarakat yang berasal dari

Kabupaten Way Kanan untuk pulang kampung dalam rangka membangun membangun daerah (Bustami Zainudin, 2011: 2).

Program Mulang tiyuh dilakukan untuk pengembangan Waykanan, oleh karena itu Bupati mengajak putra-putri Waykanan yang merantau untuk berpartisipasi membangun daerahnya, sebab membangun Waykanan tidak hanya cukup dengan bupati dan wakil bupati, tetapi putra-putri Waykanan yang berada di perantauan berpartisipasi membangun daerahnya, khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Way Kanan, yaitu “Way Kanan Bumi Petani” (Bustami Zainudin, 2011: 3).

Program Mulang Tiyuh tersebut pada dasarnya sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat di pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian. Program ini merupakan hal yang sangat positif, sebab sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih terus harus dikembangkan guna mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sejahtera. Melalui Program Mulang Tiyuh diharapkan akan terjadi transformasi pertanian dengan mengembangkan teknologi pertanian sebagai langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Maksud Program Mulang Tiyuh adalah agar masyarakat yang lahir di Waykanan tidak hanya menumpang lahir, namun juga ikut membangun daerah. Program ini diresmikan oleh Menko Kesra HR Agung Laksono di Kampung Bratayudha, Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan pada hari Sabtu 22 Januari 2011 yang lalu. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Wakil Gubernur Provinsi Lampung Joko Umar Said, Bupati dan Wakil Bupati Waykanan Bustami Zainudin dan Raden Nasution Husin (Bustami Zainudin, 2011: 3).

Program Mulang Tiyuh ini sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Bustami Zainudin, 2011: 5), yaitu sebagai berikut:

1. Mengkonsentrasikan wilayah pengembangan komoditas unggulan (didasarkan pada kesesuaian agrokologi, wilayah dan penggunaan lahan)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kemampuan bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis, sehingga SDM mendapat peningkatan agroteknik dan wawasan agribisnis.
3. Melakukan pengembangan produk dari komoditas unggulan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan
4. Melakukan pemantapan peran kelembagaan pendukung (penguatan litbang, lembaga pengkreditan, kelompok tani, koperasi dan lain-lain)
5. Membangun prasarana penyediaan sarana yang memadai dibutuhkan untuk pengembangan system dan usaha agribisnis.
6. Mewujudkan kemudahan pelayanan pada masyarakat
7. Membangun semangat kemandirian masyarakat dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan

G. Kerangka Pikir

Program Mulang Tiyuh (Pulang Kampung Membangun Desa) merupakan salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, yang pada intinya mengajak kepada para tokoh dan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Way Kanan untuk pulang kampung dalam rangka membangun membangun daerah. Hal ini merupakan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pembangunan sektor pertanian dan membantu para petani untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada tersebut adalah dengan melaksanakan Program Mulang Tiyuh

Maksud Program Mulang Tiyuh adalah agar masyarakat yang lahir di Waykanan tidak hanya menumpang lahir, namun juga ikut membangun daerah. Pemerintah daerah mengajak putra-putri Waykanan yang merantau untuk berpartisipasi membangun daerahnya, sebab membangun Waykanan tidak hanya cukup dengan bupati dan wakil bupati, tetapi putra-putri Waykanan yang berada di perantauan berpartisipasi membangun daerahnya, khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Way Kanan, yaitu “Way Kanan Bumi Petani”.

Program Mulang Tiyuh tersebut pada dasarnya sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat di pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian. Program ini merupakan hal yang sangat positif, sebab sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada

sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih terus harus dikembangkan guna mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sejahtera.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Mulang Tiyuh dalam rangka pemberdayaan petani di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut: